

WORKING PAPER PKSPL-IPB

**PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Center for Coastal and Marine Resources Studies
Bogor Agricultural University**

STUDI PENGEMBANGAN KOMODITAS EKONOMI STRATEGIS BAGI MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI BANGKA BELITUNG

Oleh:

Luky Adrianto
M. Arsyad Al Amin
Yudi Wahyudin
Ruddy Suwandi
Wawan Oktariza
Isdahartatie
Rhino Rizandi
Rumiat Hermanto



**BOGOR
2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK.....	1
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latarbelakang.....	3
1.2 Tujuan Studi	3
1.3 Lokasi Studi	4
2 METHODOLOGI	5
2.1 Pendekatan	5
2.2 Metode Pelaksanaan Kajian.....	7
2.2.1 Tahap Persiapan	7
2.2.2 Survei Lapang	7
2.3 Analisis Data, Identifikasi Isu dan Masalah.....	9
3 POTENSI DAERAH.....	14
3.1 Administrasi	14
3.2 Kependudukan.....	15
3.3 Sosial Budaya.....	16
3.4 Agama	16
3.5 Potensi Sumberdaya Alam Pesisir.....	16
3.5.1 Sumberdaya Alam Dapat Pulih.....	16
3.5.2 Sumberdaya Alam Tidak Dapat Pulih.....	19
3.6 Perekonomian.....	20
3.6.1 Mata Pencaharian	20
3.6.2 Aktivitas Perekonomian	20
3.7 Potensi Pasar Komoditas Ekonomi Pesisir	24
3.7.1 Potensi Pasar Lokal.....	24
3.7.2 Potensi Pasar Regional dan Nasional	26
4 HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Isu Strategis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir	26
4.1.1 Isu Strategis Sumberdaya Alam	26
4.1.2 Isu Strategis Sosial dan kelembagaan	27
4.1.3 Isu Strategis Ekonomi.....	28
4.1.4 Isu Strategis Pasar	28
4.2 Analisis Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>).....	28

4.3	Kebijakan, Strategi Dan Arah Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir	31
4.3.1	Komoditas Unggulan Prioritas Pilihan.....	31
4.4	Kebijakan PEMP Kabupaten Bangka Barat	32
4.4.1	Arah, Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan	32
4.4.2	Strategi dan Arah Program PEMP Kabupaten Bangka Barat.....	33
4.5	Rencana Implementasi Program PEMP Kabupaten Bangka Barat	35
	DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Lokasi sasaran penelitian.....	5
Tabel 2.	Matriks analisis kepentingan dan keterlibatan parapihak.....	9
Tabel 3.	Skala, kelas dan pewarnaan indeks unggulan prioritas	10
Tabel 4.	Komponen penyusun masing-masing komposit PPI.....	11
Tabel 5.	Jumlah kelurahan, desa, dan dusun/lingkungan menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.....	14
Tabel 6.	Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pesisir Kab. Bangka Barat	14
Tabel 7.	Jumlah penduduk, jenis kelamin dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat diatur menurut kecamatan, 2011.....	15
Tabel 8.	Suku, marga dan jenis-jenis mangrove yang didapatkan di perairan Bangka Barat, Oktober 2012 (LIPI, 2012).....	18
Tabel 9.	Jumlah produksi ikan laut dan nilainya per kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2011	21
Tabel 10.	Jumlah sarana perahu/kapal penangkap ikan laut dan jumlah nelayan menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2011	21
Tabel 11.	Jumlah rumah tangga perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pengumpul menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2011	22
Tabel 12.	Luas (Ha) area tanaman perkebunan rakyat per kecamatan dan jenis komoditi di Kabupaten Bangka Barat.....	22
Tabel 13.	Lokasi dan Destinasi wisata di Kabupaten Bangka Selatan.....	23
Tabel 14.	Ketersediaan pasokan ikan per kapita Kabupaten Bangka Barat tahun 2009-2011	25
Tabel 15.	Perkembangan harga rata-rata 9 bahan pokok di Kabupaten Bangka Barat periode 2006-2011	25
Tabel 16.	Pemangku kepentingan penanganan isu dan permasalahan di Kabupaten Bangka Barat	29
Tabel 17.	Komoditas Prioritas Utama dan Tambahan	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Studi	4
Gambar 2. Skema pendekatan Kajian Ekonomi Masyarakat Pesisir	6
Gambar 3. Framework rangkaian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir	7
Gambar 4. Tahapan Penelitian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir	8
Gambar 5. Persentase tutupan karang hidup (ST1: Tanjung Ular, ST2: Karang Berangberang, ST3: Karang Haji, ST4: Teluk Limau, ST5: Pulau Kamboja dan ST6: Pantai Tungau) (LIPI 2012).....	17
Gambar 6. Jumlah produksi bijih timah dan logam timah menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2011	23

STUDI PENGEMBANGAN KOMODITAS EKONOMI STRATEGIS BAGI MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI BANGKA BELITUNG

Luky Adrianto¹, M. Arsyad Al Amin², Yudi Wahyudin³, Ruddy Suwandi⁴, Wawan Oktariza⁵, Isdahartatie⁶, Rhino Rizandi⁷, Rumiat⁸

ABSTRAK

Masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat masih kurang memahami bagaimana mengembangkan potensi sumberdaya disekitarnya termasuk cara berproduksi yang efisien, cara mengorganisasi diri agar mandiri dan juga melembagakan kegiatan ekonominya secara efektif. Perlu dikaji secara mendalam pilihan komoditas yang paling potensial dan strategis untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan, diarahkan serta dirumuskan kebijakan dan program untuk masyarakat untuk memudahkan pembinaan baik secara teknis maupun manajerial.

Tujuan Studi ini adalah untuk menginventarisir ragam potensi ekonomi pesisir dan kelautan, menganalisis kelayakan dan menentukan potensi dan peluang pengembangan ekonomi prioritas yang paling layak untuk dikembangkan, serta merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, strategi, dan arah pengembangan ekonomi bagi masyarakat pesisir pada komoditas terpilih di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian dilaksanakan di 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Untuk Penentuan Komoditas Unggulan Prioritas digunakan pendekatan *Priority Plus Index* (PPI) atau Indeks Unggulan Prioritas (IUP), terdiri atas 4 (empat) komponen indeks, yaitu: (i) indeks pemasaran (MI); (ii) indeks sosial (SI); (iii) indeks teknologi (TI); dan (iv) indeks ekonomi (EI). Untuk menyusun perencanaan dan arahan implementasi program pengembangan ekonomi masyarakat dan arahan pengembangan komoditas terpilih digunakan analisis kebijakan yang diformulasikan dan disajikan dalam *project planning matrix* (PPM) berdasarkan *logical framework analysis* (LFA). Analisis pasar (lokal, regional, nasional) digunakan *hibryd market analysis*. Perumusan rencana strategi pengembangan ekonomi pesisir (CEP) menggunakan pendekatan *strategic planning*.

Komoditas Unggulan Prioritas Pilihan yang dianalisis dengan PPI pada setiap kecamatan, secara berurutan adalah : (1) kepiting hitam (mangrove), (2)

¹ Dosen di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK-IPB, Dekan FPIK IPB dan Peneliti Senior PKSPL-IPB

² Peneliti Bid. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, PKSPL-IPB

³ Peneliti Bid. Ekonomi Sumberdaya Kelautan, PKSPL-IPB

⁴ Dosen di Departemen Teknologi Hasil Perairan FPIK-IPB dan Sekretaris PKSPL-IPB

⁵ Dosen di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perairan FPIK IPB

⁶ Peneliti Bid. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, PKSPL IPB

⁷ Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bangka Barat

⁸ Staf di Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bangka Barat

rajungan (3) penangkapan udang (3) teri, dan (5) udang lipan. Arah kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir didukung dengan arah kebijakan terintegrasi, kebijakan ekonomi makro, pengembangan infrastruktur, sistem usaha dan investasi, IPTEK dan SDM, serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, melalui : (1). Meningkatkan daya saing komoditas perikanan dan kelautan; (2). Meningkatkan nilai tambah dan kualitas komoditas perikanan dan kelautan yang mencakup input (ekosistem pesisir), proses (sistem produksi) dan output (nilai tambah komoditas). (3). Meningkatkan kualitas pengelolaan produksi dan industri pengolahan komoditas perikanan dan kelautan. (4). Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan melalui Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan bisnis komoditas perikanan dan kelautan berbasis masyarakat.

Keyword : komoditas unggulan, ekonomi pesisir, pemberdayaan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi dan sosial, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya sumberdaya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya kapasitas berorganisasi masyarakat.

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari wilayah pesisir dan beberapa pulau kecil yang mempunyai wilayah yang luas serta kaya dengan hasil lautnya. Seluruh potensi itu belum bisa mendongkrak pendapatan nelayan, karena nelayannya masih cenderung menggunakan teknologi tradisional, kebanyakan nelayan hanya mengandalkan hasil tangkapan laut untuk bertahan hidup dengan peralatan tangkap sederhana, sehingga hasil yang di dapatkan tidak maksimal. Apalagi kemudian godaan untuk beralih menjadi penambang timah sangat besar, meskipun dilakukan secara ilegal.

Masyarakat pesisir khususnya nelayan di Kabupaten Bangka Barat masih sangat tertinggal. Mereka kurang memahami potensi sebenarnya dari kekayaan sumberdaya disekitarnya dan belum mengetahui tentang cara memproduksi yang efisien, belum mengorganisasi diri agar mandiri dan juga kelembagaannya masih lemah karena para nelayan masih bersifat individu dalam pengembangan usahanya.

Perlu dikaji secara mendalam pilihan komoditas yang paling potensial dan strategis untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan, perlunya arahan serta petunjuk agar masyarakat pesisir dapat membentuk suatu kelembagaan atau organisasi dalam pengembangan usaha kearah yang lebih maju sehingga mempermudah koordinasi antara pemerintah dengan nelayan, dalam hal ini untuk memudahkan pembinaan baik secara teknis ataupun manajemen untuk memperlancar pemasaran hasil tangkapan ikan ataupun pemanfaatan sumberdaya pesisir yang lain.

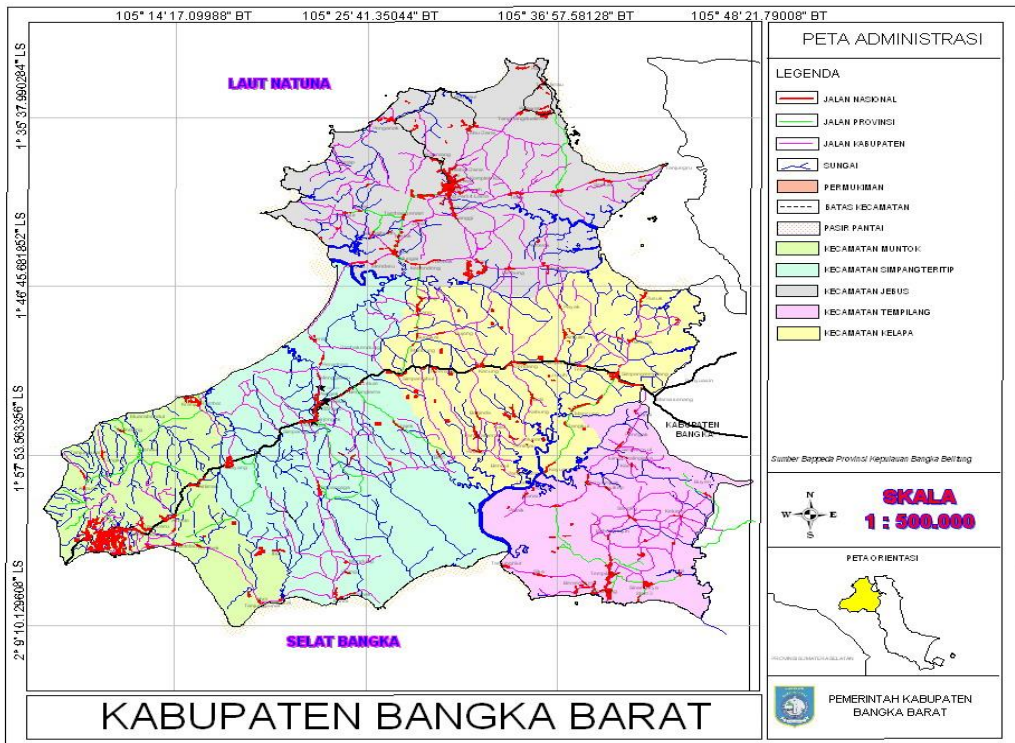
1.2 Tujuan Studi

- 1) Menginventarisasi ragam potensi ekonomi wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bangka Barat.
- 2) Mengidentifikasi isu dan permasalahan strategis pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bangka Barat.

- 3) Mengkaji potensi pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).
- 4) Menganalisis kelayakan dan menentukan potensi dan peluang pengembangan ekonomi prioritas yang paling layak untuk dikembangkan di Kabupaten Bangka Barat.
- 5) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, strategi, dan arah pengembangan Ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) prioritas terpilih di Kabupaten Bangka Barat..

1.3 Lokasi Studi

Lokasi penelitian meliputi seluruh wilayah kecamatan pesisir di Kabupaten Bangka Barat, yang terdiri 6 kecamatan dan 19 desa seperti pada **Gambar 1** dan dijabarkan pada **Tabel 1** berikut ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Studi

Tabel 1. Lokasi sasaran penelitian

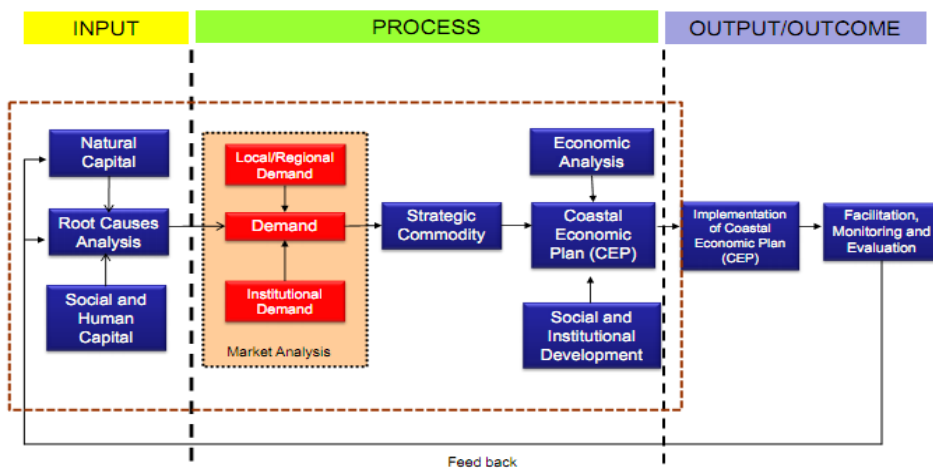
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Lokasi
1	Muntok	Air Putih	122	Dusun Tanjung Ular Dusun Jungku Dusun Bendul/Selindung
		Belo Laut	80	Dusun Belo Laut Dusun Pangkal Ahoi Dusun Tanjung Punai Dusun Sukal Dusun Pait
		Air Limau	93	Dusun Air Mas
2	Jebus	Sungai Buluh		Dusun Sungai Buluh
		Pebuar		Dusun Pebuar & Unar
3	Parit Tiga	Bakit	18,25	Dusun Bakit Dusun Belembang Dusun Tanjung Ru Dusun Culong
		Teluk Limau	34,86	Dusun Teluk Limau Dusun Pala
		Air Gantang	33,05	Dusun Penganak
		Cupat	30,08	Dusun Cupat
		Kelabat	33,05	Dusun Jebu Laut
4	Kelapa	Pusuk	15,12	Dusun Pusuk
5	Tempilang	Tanjung Niur	126,59	Dusun Tanjung Niur
		Air Lintang	68,55	Dusun Air Lintang Dusun Pasir Kuning
		Sinar Surya	16,86	Dusun Basun
		Benteng Kota	11	Dusun Lampu Merah
6	Simpang Teritip	Air Nyatoh	71,5	Dusun Air Nyatoh
		Kundi	360	Dusun Kundi Dusun Belanak
		Simpang Gong	28	Dusun Tungau
		Rambat	26	Dusun Rambat Dusun Keranji

2 METHODOLOGI

2.1 Pendekatan

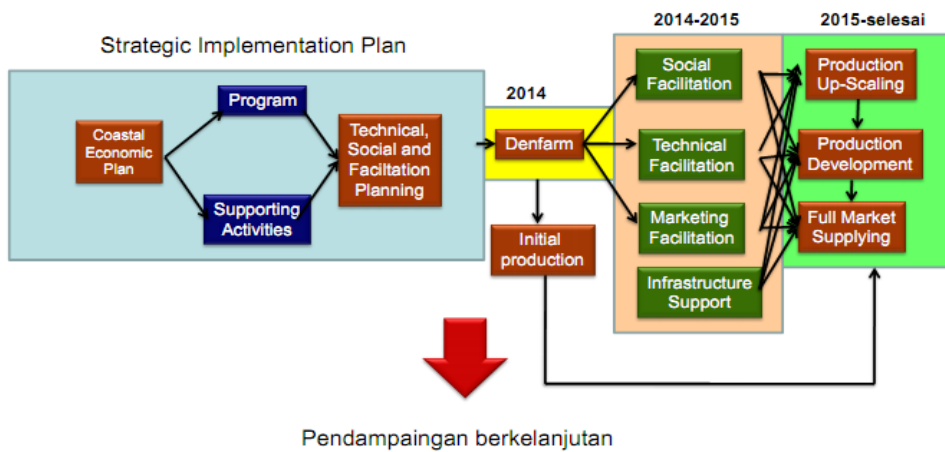
Riset Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Bangka Barat ini diharapkan dapat menghasilkan output terumuskannya *coastal economy plan* (CEP) yaitu sebuah rumusan kebijakan, strategi dan arah Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Bangka Barat yang dapat direkomendasikan komoditas dan program prioritas terpilih kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah program yang didasari pada kebutuhan riil secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang tepat agar riset ini dapat menghasilkan output yang tepat.

Pendekatan riset Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Bangka Barat ini secara umum didasarkan pada proses pengembangan potensi sumberdaya pesisir yang mencakup tersedianya input berupa sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta kelembagaan yang dapat dikembangkan. Sumberdaya alam pesisir dan laut harus dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan itu hanya dapat dilakukan jika strategi pengembangannya adalah melalui program yang berbasis masyarakat dengan mengedepankan pada pendekatan partisipatif, termasuk dalam riset ini. Untuk dapat mencapai strategi dan arah itu diperlukan serangkaian analisis sosial ekonomi, dan kelembagaan yang tepat sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat. Secara skematik, pendekatan ini dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Skema pendekatan Kajian Ekonomi Masyarakat Pesisir

Riset ini adalah tahap awal, yang harus ditindaklanjuti dengan serangkaian aktivitas implementasi yang riil, sehingga hasil rekomendasi kegiatan ini bukan semata hasil kajian tetapi juga dapat diimplementasikan. Sekwensi dari tindaklanjut riset ini perlu dikemukakan agar setelah riset ini selesai dapat ditindak lanjut dengan kegiatan lanjutan sebagaimana tercantum pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Framework rangkaian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.2 Metode Pelaksanaan Kajian

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah metode survei partisipatif. Untuk melakukan kegiatan ini, pentahapan kegiatan dilakukan masing-masing adalah: (1) pengumpulan data dan informasi (melalui survei data sekunder dan data primer); (2) kegiatan analisis data; dan (3) formulasi kebijakan.

Secara rinci, tahap pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

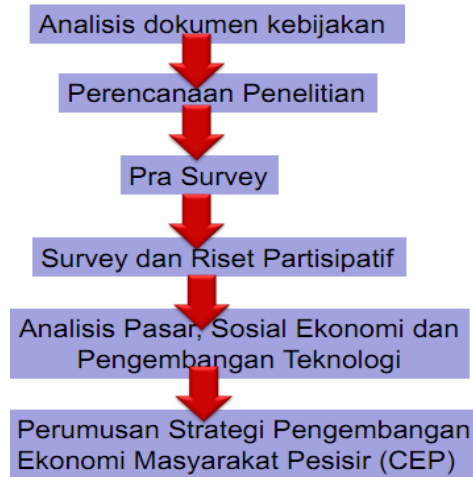
2.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan mempelajari kerangka acuan, memberi tanggapan dan menyusun rencana kerja (proposal). Tahap persiapan ini juga disertai mobilisasi individu yang terlibat dalam kegiatan, baik tenaga ahli, asisten ahli maupun tenaga administrasi.

2.2.2 Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder. Survei data sekunder dilakukan pada lembaga-lembaga pemerintah (daerah), universitas, perusahaan maupun lembaga lain yang terkait. Sedangkan survei data primer dilakukan baik melalui survei pendahuluan, survei situasi (reconnaissance survey) maupun survey lanjutan (Bunce et al., 2002). Untuk mengatasi luasnya lokasi dan kondisi geografis, maka survei data primer akan dilakukan dengan mengelompokkan daerah-daerah yang mempunyai kategori/tipikal yang sama atau berdekatan. Mengingat terbatasnya waktu dan luasan daerah, maka survei data primer dilakukan menggunakan metode survei cepat (rapid appraisal), diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) setiap

komponen stakeholders pada masing-masing wilayah, maupun diskusi mendalam (indepth interview) pada informan kunci baik formal maupun non-formal. Secara skematik tahapan penelitian dicantumkan dalam **Gambar 4**.



Gambar 4. Tahapan Penelitian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1) Populasi dan Sampel

Populasi dalam pengkajian ini adalah nelayan, penyuluh serta staf dinas-dinas di kabupaten dan provinsi, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Jumlah total peserta FGD ini berkisar 10 – 20 orang di setiap lokasi.

2) Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan observasi di lapangan, untuk mengidentifikasi dan menelaah berbagai informasi meliputi:

- a. Data karakteristik eksisting inovasi teknologi perikanan.
- b. Data karakteristik eksisting inovasi kelembagaan yang dikembangkan.
- c. Data kelompok usaha bersama (KUBE) meliputi ketersediaan wilayah tangkapan ikan, tenaga kerja, biaya, produksi dan pendapatan nelayan.
- d. Data kelembagaan masyarakat meliputi keberadaan kelompok nelayan dan pembinaan yang dilakukan.

Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan. Data sekunder yang akan dikumpulkan meliputi:

- i). Kondisi geografis
- ii) Infrastruktur dan kelembagaan
- iii). Kondisi Sumberdaya alam, potensi dan pengelolaannya
- iv). Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk.
- vi). Pekerjaan

2.3 Analisis Data, Identifikasi Isu dan Masalah

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Identifikasi isu dan masalah strategis ekonomi menggunakan metode focus group discussions yang didukung dengan observasi/survei cepat, indepth interview, diskusi kelompok maupun penelusuran terhadap program yang telah dilakukan sebelumnya, serta merujuk hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya.

1) Analisis stakeholders

Analisis parapihak digunakan untuk memetakan hubungan-hubungan yang terjadi antar parapihak (stakeholders) dalam kaitan dengan pengembangan masyarakat. Analisis ini diantaranya meliputi:

- a) Analisis para pihak (stakeholders) terkait.
- b) Analisis kepentingan dan peran parapihak terkait.
- c) Analisa relasi dan posisi para pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- d) Matriks tingkat kepentingan dan keterlibatan para pihak.

Pemetaan parapihak ditujukan untuk mendapatkan posisi relatif serta tingkat kepentingan dan tingkat kontribusinya pada posisi sekarang. Secara sederhana, relasi ini dapat dilihat dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Matriks analisis kepentingan dan keterlibatan parapihak

		TINGKAT KEPENTINGAN	
		TINGGI	RENDAH
TINGKAT KETERLIBATAN	KUAT		
	LEMAH		

Sumber : Diadaptasi dari Bryson (2004)

2) Analisis Penentuan Komoditas Unggulan Prioritas

Komoditas unggulan merupakan produk daerah yang paling diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Komoditas unggulan sangat memerlukan perencanaan pengembangan yang baik dan terintegrasi sehingga benar-benar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan daerah setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode efektif dalam menentukan unggulan prioritas. Metode ini dapat didekati dengan menggunakan pendekatan Priority Plus Index (PPI) atau Indeks Unggulan Prioritas (IUP), yang dikembangkan dari metodologi indeks kepekaan lingkungan dan kriteria investasi pulau kecil oleh PKSPL-IPB dan Adrianto et al (2011). PPI ini terdiri atas 4 (empat) komponen indeks, yaitu: (i) indeks pemasaran (MI); (ii) indeks sosial (SI); (iii) indeks teknologi (TI); dan (iv) indeks ekonomi (EI). Masing-masing komponen penyusun PPI ini mempunyai nilai skala dari 1 hingga 5, sehingga dengan menempatkan semua komponen mempunyai kedudukan seimbang dalam menentukan PPI, maka formula indeks unggulan prioritas ini dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$PPI = MI * SI * TI * EI$$

Pada akhirnya indeks unggulan prioritas ini akan menghasilkan nilai indeks dari 1 hingga 625 dan dibagi menjadi 5 (lima) kelas prioritas, seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Skala, kelas dan pewarnaan indeks unggulan prioritas

No	Priority Plus Index (PPI)	Prioritas Komoditas	Kelas Komoditas	Pewarnaan
1	1	Bukan prioritas	-	Warna hijau
2	2 – 16	Kurang prioritas	Standar	Warna biru
3	17 – 81	Cukup	Silver	Warna Perak
4	82 – 256	Prioritas	Gold	Warna Emas
5	257 – 625	Sangat prioritas	Platinum	Warna Hitam

Sumber: dimodifikasi dari Wahyudin (2013) dan Adrianto et al (2011)

Secara umum, masing-masing indeks mempunyai komponen penyusun indeks dan masing-masing komponen penyusun indeks tersebut mempunyai skala nilai dari 1 hingga 5. Masing-masing komponen indeks dalam setiap indeksnya mempunyai kedudukan yang sama, sehingga nilai setiap indeks dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan rata-rata geometrik yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$CPPI_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n CPPI_{i,j}}$$

$CPPI_i$ adalah komposit indeks unggulan prioritas ke-i, seperti indeks pasar (MI), indeks sosial (SI), indeks teknologi (TI) dan indeks ekonomi (TI), sedangkan adalah komponen indeks unggulan prioritas ke-j dari komposit indeks unggulan prioritas ke-i. Adapun komponen masing-masing komposit indeks unggulan prioritas selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Komponen penyusun masing-masing komposit PPI

No	Komposit PPI	Komponen Penyusun	Kode	Kriteria	Skor
1	Indeks pemasaran (MI)	Tujuan pasar	MI1	setempat (desa/kecamatan)	1
				lokal (daerah kota/kabupaten)	2
				regional (provinsi)	3
				nasional (Indonesia)	4
				internasional (dunia)	5
		Harga komoditas	MI2	sangat rendah	
				Rendah	2
				Sedang	3
				Tinggi	4
		Kontinuitas pasokan	MI3	sangat tinggi	5
				Tidak kontinyu	1
				kurang kontinyu	3
		Kontinyu	5		
2	Indeks sosial (SI)	Dapat diterima secara sosial	SI1	komoditas belum pernah ada	1
				komoditas pernah ada tapi kurang berkembang dan kurang diminati masyarakat	2
				komoditas diterima masyarakat tapi permintaannya kurang	3
				komoditas diterima dan digemari masyarakat	4
				komoditas digemari masyarakat dan menjadi barang favorit yang dikonsumsi	5
		Dukungan kelembagaan di lokasi	SI2	Tidak ada lembaga pembina	1
				Ada dinas teknis pembina tapi kurang bekerja di wilayah	3
				Dinas teknis bekerja membina	5
		Modal sosial	SI3	Belum mau	1
				ada kemauan tapi tidak antusias	3
				mau dengan antusias	5
		3	Indeks teknologi (TI)	Terkait dengan perkembangan jaman/budaya terutama pada aspek efektivitas dan efisiensi	TI1
Masih tradisional tapi sudah menggunakan alat bantu mesin sederhana (tradisional plus)	2				
Sudah menggunakan alat bantu mesin semi modern	3				

No	Komposit PPI	Komponen Penyusun	Kode	Kriteria	Skor	
				Menggunakan alat bantu mesin dengan sistem komputerisasi	4	
				Menggunakan alat bantu mesin dengan dengan teknologi nano	5	
		Kemudahan operasional peralatan dan tingkat efisiensi	T12	Dioperasikan manual	1	
					Dioperasikan semi otomatis	3
					Dioperasikan secara otomatis	5
		Level kemajuan teknologi	T13	Dasar/basik	1	
					Menengah	3
					Canggih/sophisticated/advance	5
4	Indeks ekonomi (EI)	Kelayakan finansial	E11	Net Present Value (E11.1) →		
				$NPV_i = \frac{NPV_i}{\max NPV}$		
				$NPV \leq 0.2$	1	
				$0.2 < NPV \leq 0.4$	2	
				$0.4 < NPV \leq 0.6$	3	
				$0.6 < NPV \leq 0.8$	4	
				$0.8 < NPV \leq 1.0$	5	
				Benefit-Cost Ratio (E11.2) →		
				$BCR_i = \frac{BCR_i}{\max BCR}$		
				$BCR \leq 0.2$	1	
				$0.2 < BCR \leq 0.4$	2	
				$0.4 < BCR \leq 0.6$	3	
				$0.6 < BCR \leq 0.8$	4	
				$0.8 < BCR \leq 1.0$	5	
				Internal Rate Return (E11.3) →		
		$IRR_i = \frac{IRR_i}{\max IRR}$				
		$IRR \leq 0.2$	1			
		$0.2 < IRR \leq 0.4$	2			
$0.4 < IRR \leq 0.6$	3					
$0.6 < IRR \leq 0.8$	4					
$0.8 < IRR \leq 1.0$	5					
		Program unggulan ekonomi daerah	E12	Tidak termasuk	1	
					Termasuk	3
					Prioritas	5
		Skala ekonomi produksi	E13	konsumsi sendiri	1	
					rumah tangga	2
					industri kecil	3
					industri menengah	4
					industri besar	5

No	Komposit PPI	Komponen Penyusun	Kode	Kriteria	Skor
		Kemungkinan banyaknya masyarakat terlibat	E14	$POP_i = \frac{POP_i}{\max POP}$, dimana <i>POP</i> adalah jumlah masyarakat yang kemungkinan dapat terlibat dalam pengembangan komoditas, <i>max POP</i> adalah jumlah masyarakat terbanyak yang terlibat	
				$POP \leq 0.2$	1
				$0.2 < POP \leq 0.4$	2
				$0.4 < POP \leq 0.6$	3
				$0.6 < POP \leq 0.8$	4
				$0.8 < POP \leq 1.0$	5
		Kemungkinan besarnya pendapatan per kapita per tahun	E15	$INCO_i = \frac{INCO_i}{\max INCO}$, dimana <i>INCO</i> adalah jumlah pendapatan per kapita per tahun yang kemungkinan dapat diterima, <i>maxINCO</i> adalah jumlah pendapatan per kapita per tahun terbanyak yang dapat diterima	
				$INCO \leq 0.2$	1
				$0.2 < INCO \leq 0.4$	2
				$0.4 < INCO \leq 0.6$	3
				$0.6 < INCO \leq 0.8$	4
				$0.8 < INCO \leq 1.0$	5

3) Analisis kebijakan

Dilakukan untuk menyusun matrik kebijakan dan arahan perencanaan program pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan untuk menjawab problem dan sekaligus arahan pengembangan komoditas terpilih. Arahan dan kebijakan implementasi program ini mencakup kebijakan yang diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi pengembangan komoditas, dan strategi yang diperlukan untuk menjalankan program yang meliputi sasaran, tujuan, input serta target yang ditentukan untuk mempermudah institusi pelaksana kegiatan, dalam mengimplementasikan arahan rencana tersebut. Analisis formulasi ini disajikan dalam project planning matrix (PPM) berdasarkan logical framework analysis (LFA). Identifikasi strategi ekonomi menggunakan pendekatan metode triangulasi partisipatif yang digali melalui metode focus group discussions. Sementara kajian pasar menggunakan hibryd market analysis – lokal, regional, nasional. Perumusan rencana strategi pengembangan ekonomi pesisir (CEP) menggunakan pendekatan strategic planning.

3 POTENSI DAERAH

3.1 Administrasi

Kabupaten Bangka Barat (KBB) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdiri sejak tahun 2003, yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Secara geografis Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi 105°00'–106°00' Bujur Timur, 01°00'–02°10' Lintang Selatan. Wilayah KBB berbatasan langsung dengan Selat Bangka di sebelah barat dan selatan. Di sebelah timur dan utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka dan Laut Natuna. Luas wilayah KBB berupa daratan 2.884,15 km² dan luas wilayah laut kewenangan Kabupaten 1.723,55 km², dengan panjang garis pantai 297,38 km mulai dari Kecamatan Kelapa di Teluk Kelabat, Laut Natuna, Selat Bangka sampai Kecamatan Tempilang di bagian selatan.

KBB secara administrasi pemerintahan terdiri dari 6 Kecamatan yaitu (1) Kecamatan Muntok, (2) Kecamatan Jebus, (3) Kecamatan Paritiga, (4) Kecamatan Kelapa, (5) Kecamatan Tempilang, dan (6) Kecamatan Simpang Teritip, 4 Kelurahan dan 60 desa, dengan ibu kota kabupaten terletak di Muntok. Kabupaten Bangka Barat adalah kabupaten berpesisir terluas di Pulau Bangka. Ke-enam kecamatan di Kabupaten Bangka Barat memiliki 34 desa yang terletak di daerah pesisir. Desa-desa pesisir di ke enam kecamatan tersebut disajikan dalam **Tabel 5**.

Tabel 5. Jumlah kelurahan, desa, dan dusun/lingkungan menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kelurahan	Desa	Dusun	RW	RT
01.	Muntok	505,94	3	4	16	32	129
02.	Simpang Teritip	637,35	-	13	29	-	39
03.	Kelapa	573,80	1	13	28	26	116
04.	Tempilang	461,02	-	9	26	-	92
05.	Jebus	351,93	-	11	23	34	75
06.	Parit Tiga	354,02	-	10	28	1	66
Jumlah		2.884,06	4	60	150	93	517

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka (2012)

Tabel 6. Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pesisir Kab. Bangka Barat

No	Kecamatan	Desa
01.	Muntok	Belo Laut Air Belo Sungai Baru Tanjung Air Putih Air Limau
02.	Simpang Teritip	Rambat

No	Kecamatan	Desa
		Simpang Gong Pelangas Berang Ibul Peradong Air Nyatoh Air Menduyung Bukit Terak
03.	Kelapa	Kayuarang Pusuk Tuik Pangkal Beras
04.	Tempilang	Tanjung Niur Benteng Kota Air Lintang Sinar Surya
05.	Jebus	Jebus Rukam Sungai Buluh Ketap
06.	Parittiga	Bakit Semulut Kapit Air Gantang Kelabat Cupat Teluk Limau

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka (2012)

3.2 Kependudukan

Penduduk KBB sebesar 189.529 jiwa pada tahun 2011, dimana Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 50.188 jiwa dan Kecamatan Jebus memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 19.775 jiwa (**Tabel 7**). Tingkat kepadatan penduduk KBB sebesar 65 orang per km².

Tabel 7. Jumlah penduduk, jenis kelamin dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat diatur menurut kecamatan, 2011

Kecamatan ⁵	Luas Daerah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan (/km ²)
Muntok	505,94	25.817	24.371	50.188	99
Simpang Teritip	637,35	14.078	13.204	27.282	43
Kelapa	573,80	17.017	15.697	32.714	57
Tempilang	461,02	13.674	13.005	26.679	58
Jebus	351,93	10.240	9.535	19.775	56
Parittiga	354,11	17.062	15.829	32.891	93
Jumlah	2.884,15	97.888	91.641	189.529	66

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka (2012) diolah

3.3 Sosial Budaya

Etnis penduduk Kabupaten Bangka Barat terdiri dari suku Melayu, Tionghoa, Jawa, Arab Melayu, Palembang, Bugis, dan Batak.

3.4 Agama

Pemeluk agama/kepercayaan KBB mayoritas adalah Islam. Jumlah sarana peribadatan berupa mesjid sebanyak 164 unit, langgar/musholla 115 unit, gereja 20 unit, dan kelenteng sebanyak 15 unit, tempat ibadah umat Konhucu 1 unit serta vihara/pura 6 unit.

3.5 Potensi Sumberdaya Alam Pesisir

Kabupaten Bangka Barat memiliki wilayah pesisir yang panjang dan dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, di wilayah ini juga terdapat perairan payau, rawa, sungai, dan *kolong* (bekas galian timah).

3.5.1 Sumberdaya Alam Dapat Pulih

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2012 mendapatkan data jenis sumberdaya alam perairan di Kabupaten Bangka Barat terdiri dari jenis ikan, terumbu karang, lamun, rumput laut, fitoplankton, zooplankton, algae, mangrove, baringtonia, dan jenis-jenis vegetasi pantai.

1) Sumberdaya Ikan

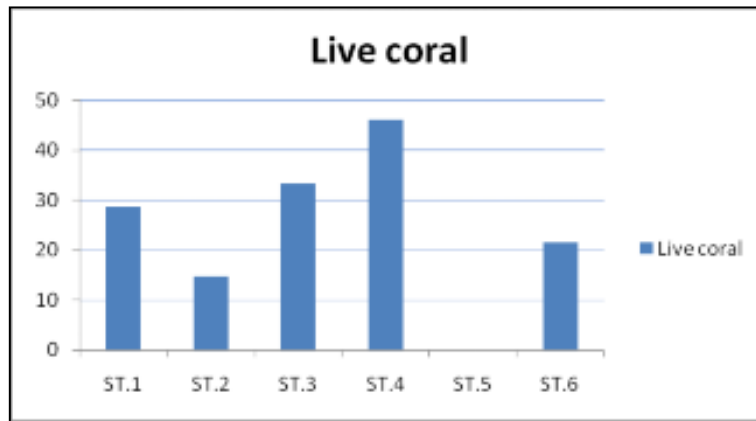
Sumberdaya ikan khususnya perikanan laut sangat dominan. Selain potensi perikanan laut, perairan Kabupaten Bangka juga memiliki potensi pengembangan budidaya laut untuk komoditas kakap, kerapu, kerang, dan rumput laut. Produksi ikan laut di KBB dirasakan mengalami penurunan. Penurunan sumberdaya ikan sangat dirasakan akhir-akhir ini, dimana jarak daerah penangkapan "*fishing ground*" semakin jauh dari pantai. Produksi ikan laut KBB tahun 2011 tercatat sebanyak 8.983,68 ton sementara tahun 2010, produksi ikan laut tahun 2010 sebanyak 8.272,94 ton, sementara tahun 2009 masih cukup tinggi yaitu sebanyak 9.908,40 ton (Bangka Barat Dalam Angka, 2012).

Hasil penelitian LIPI (2012) mendapatkan 45 jenis ikan dari 18 genus hidup di perairan Bangka Barat. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia, kelimpahan jenis ikan di perairan Bangka Barat ini termasuk yang rendah, yang diduga disebabkan oleh tingginya kekeruhan perairan sebagai akibat kegiatan penambangan timah. Secara langsung, kekeruhan yang tinggi berpengaruh pada kualitas jenis dan tutupan terumbu karang. Buruknya kualitas

terumbu karang akan menurunkan daya tarik ikan pada sumber pakan (plankton dan zooplankton) yang hidup di dalam ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Perkiraan potensi perikanan tangkap di daerah itu mencapai 1.210.662 ton per tahun, terdiri dari ikan demersal 656.000 ton per tahun, ikan pelangis kecil 513.000 ton per tahun, ikan-ikan karang 27.565 ton per tahun, cumi-cumi 2.679 ton per tahun dan udang 11.400 ton per tahun (DKP Bangka Barat, 2012).

2) Terumbu karang

Hasil penelitian LIPI (2012) mendapatkan tutupan karang sebesar 70% di lepas pantai Teluk Limau. Terumbu karang juga dijumpai di sekitar Tanjung Pabrik, di ujung barat Teluk Klabat, di perairan Lampu Merah, dan di perairan sekitar pulau-pulau kecil di depan Tempilang. Persentase tutupan karang hidup dicantumkan dalam Gambar 4.



Gambar 5. Persentase tutupan karang hidup (ST1: Tanjung Ular, ST2: Karang Berangberang, ST3: Karang Haji, ST4: Teluk Limau, ST5: Pulau Kamboja dan ST6: Pantai Tungau) (LIPI 2012)

3) Lamun

Menurut Green & Short (2003) dalam LIPI (2012), luas tutupan lamun di pesisir Bangka Barat sebesar 0,5-18 ha dengan persentase antara 5-15 % dari seluruh perairan pantai. Jenis lamun yang hidup di pesisir Bangka Barat ada 9 jenis, yaitu: *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Halodule pinifolia*, *Halodule uninervis*, *Syringodium isoetifolium*, dan *Thalassodendron ciliatum*. Tahun 2012, hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa lamun yang ditemukan hanya 4 jenis, yaitu *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea*

rotundata. Substrat yang paling sesuai untuk pertumbuhan lamun hanya terdapat di Pantai Panjang, Teluk limau, dan Gosong Berang-Berang. Jumlah spesies lamun yang terdapat di pesisir Bangka Barat hanya 6,0% dari 67 jenis lamun di dunia, dan 30,7% dari 13 jenis diantaranya ditemukan di Indonesia. Di Pantai Panjang dan Teluk Limau, hanya ditemukan 3 jenis yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, dan *Cymodocea rotundata*, sedangkan di Gosong Berang-Berang hanya ada *Halophila ovalis*.

4) Mangrove

Ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Bangka Barat relatif masih baik dan khususnya tersebar di Tempilang, muara Sungai Niur dan Sungai Menduyung, Kundi, Tembelok, dan di sekitar peleburan timah di Muntok. Hasil penelitian LIPI tahun 2012 sudah mendata genus dan spesies mangrove yang tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana tercantum dalam **Tabel 8**.

Tabel 8. Suku, marga dan jenis-jenis mangrove yang didapatkan di perairan Bangka Barat, Oktober 2012 (LIPI, 2012)

No	Suku	No	Jenis
1	Acanthaceae	1	<i>Acanthus ebracteatus</i>
2	Aizoaceae	2	<i>Sesuvium portulacastrum</i>
3	Amaryllidaceae	3	<i>Crinum asiaticum</i>
4	Apocynaceae	4	<i>Cerbera manghas</i>
5	Asclepiadaceae	5	<i>Calotropis gigantean</i>
6	Avicenniaceae	6	<i>Avicennia marina</i>
7	Combrataceae	7	<i>Lumnitzera Littorea</i>
		8	<i>Terminalia catappa</i>
8	Convolvulaceae	9	<i>Ipomoea pes-caprae</i>
9	Goodeniaceae	10	<i>Scaevola taccada</i>
10	Guttiferae	11	<i>Calophyllum inophyllum</i>
		12	<i>Derris trifolia</i>
		13	<i>Pongamia pinnata</i>
		14	<i>Passiflora foetida</i>
12	Lithraceae	15	<i>Phemphis acidula</i>
13	Malvaceae	16	<i>Hibiscus tiliaceus</i>
		17	<i>Tespesia populnea</i>
14	Melastomataceae	18	<i>Melastoma candidum</i>
15	Meliaceae	19	<i>Excoecaria agallocha</i>
		20	<i>Xylocarpus granatum</i>
16	Palmae	21	<i>Nypa fruticans</i>
		22	<i>Onchosperma tigillaria</i>
17	Pandanaceae	23	<i>Pandanus tectorius</i>
18	Pteridaceae	24	<i>Acrostichum aureum</i>
		25	<i>Acrostichum speciosum</i>
19	Rubiaceae	26	<i>Morinda citrifolia</i>

No	Suku	No	Jenis
		27	<i>Guettarda speciosa</i>
		28	<i>Scyphiphora hydrophyllacea</i>
20	Rhizophoraceae	29	<i>Ceriops tagal</i>
		30	<i>Bruguiera cylindrical</i>
		31	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>
		32	<i>Rhizophora apiculata</i>
		33	<i>R. lamarckii</i>
		34	<i>R. mucronata</i>
		35	<i>R. stylosa</i>
21	Sonneratiaceae	36	<i>Sonneratia alba</i>
		37	<i>S. caseolaris</i>
22	Sterculiaceae	38	<i>Heritiera Littoralis</i>
23	Verbenaceae	39	<i>Clerodendrum inerme</i>
		40	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>

Catatan: 23 marga, 35 suku dan 40 jenis

5) Plankton

Analisis terhadap struktur komunitas plankton di perairan Selat Bangka ditemukan 28 genus fitoplankton dan 34 grup taksa zooplankton. Genus yang dominan dari fitoplankton co-dominan adalah *Bacteriastrium*, *Chaetoceros*, dan *Thalassiothrix*, yang merupakan fitoplankton yang umum terdapat di perairan Indonesia. Tingginya nilai penting *Bacteriastrium*, *Chaetoceros*, dan *Thalassiothrix* menandakan bahwa perubahan kelimpahan salah satu dari ketiga genus co-dominan tersebut dapat mempengaruhi struktur komunitas fitoplankton. Berkaitan dengan fungsi fitoplankton sebagai produsen primer di perairan, perubahan struktur komunitasnya dapat pula mengakibatkan perubahan struktur komunitas konsumennya (zooplankton, udang, dan kerang) (LIPI 2012).

6) Vegetasi pantai

Vegetasi pantai yang umum terdapat di pesisir adalah kelapa, karet, siwalan, dan beberapa jenis tanaman lain yang hidup di habitat daratan dengan sumberdaya air tawar, namun berada di wilayah pesisir. Sumberdaya air tawar di Kabupaten Bangka Barat terhitung cukup banyak karena sampai ke wilayah pesisir.

3.5.2 Sumberdaya Alam Tidak Dapat Pulih

Potensi SDA tidak dapat pulih di wilayah pesisir KBB sebagian besar adalah sumberdaya logam timah. Jumlah produksi bijih timah dan logam timah tahun 2011 mencapai 8.490,5 ton dan 8.720,311 Metric Ton (Bangka Barat Dalam Angka, 2012). Sumberdaya tidak dapat pulih lainnya yang juga belum dimanfaatkan secara optimal adalah batu granit yang secara tidak merata tersebar hampir diseluruh wilayah pesisir Bangka Barat. Pada saat ini, pemanfaatan batu granit hanya dikategorikan sebagai bahan tambang galian golongan C, yang digunakan

sebagai batu koral. Selain kedua bahan tambang tersebut, di Kabupaten Bangka Barat juga terdapat kuarsa, ilmenit, kaolin, bauksit, granit, dan zirkon.

3.6 Perekonomian

3.6.1 Mata Pencaharian

Kegiatan mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Bangka Barat bervariasi. Penduduk Kabupaten Bangka Barat bekerja disektor pertanian (27.355 orang), diikuti sektor pertambangan dan penggalian (22.409 orang), lalu sektor konstruksi (14.507 orang), sedangkan sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor terkecil (hanya 719 orang). Jumlah angkatan kerja di KBB sebanyak 87.221 jiwa, jumlah yang bekerja 84.044 orang terdiri dari 56.027 laki-laki dan 28.017 perempuan, sedangkan sebanyak 3.177 orang yang belum mempunyai pekerjaan. Sebagian besar penduduk KBB bekerja di sektor pertanian (27.355 orang), diikuti sektor pertambangan dan galian (22.409 orang), sektor konstruksi (14.507 orang), sedangkan sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor terkecil (hanya 719 orang).

3.6.2 Aktivitas Perekonomian

1) Perikanan

Sub sektor perikanan (perikanan tangkap dan budidaya) cukup dominan di Kabupaten Bangka Barat mengingat wilayah ini dikelilingi dan berbatasan dengan laut yang memiliki sumberdaya laut relatif besar untuk dikembangkan. Penurunan hasil tangkap juga ditunjukkan oleh terjadinya penurunan jumlah sarana-prasarana penangkap ikan di laut berupa perahu/kapal armada penangkapan dan juga jumlah rumah tangga perikanan (RTP) sebagai pelaku usaha perikanan. Tahun 2011 jumlah kapal motor sebanyak 1.265 unit dan jalankan /dikelola oleh 2.333 kepala keluarga (KK). Jumlah rumah tangga perikanan dilihat dari jumlah nelayan tahun 2011 sebanyak 2.151 nelayan, jumlah pembudidaya 345, sementara pengolahan sebanyak 253 KK, dan pengumpul 34 KK.

Potensi sumberdaya ikan air tawar juga banyak terdapat di Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari sungai, rawa, dan kolong, baik yang diproduksi melalui kegiatan penangkapan maupun budidaya. Jenis ikan yang tertangkap diantaranya perikanan darat gabus, baung, udang galah, lele lokal, belida, dll. Jenis ikan yang sudah dibudidayakan di kolam dan tambak antara lain adalah ikan patin, lele, gurami, nila, mujair, bawal, mas, baung, dll. Selain dibudidayakan di kolam dan tambak, ikan-ikan tersebut juga dibudidayakan di dalam karamba jaring apung, baik di sungai dan kolong. Potensi budidaya laut (marikultur) dan budidaya air payau juga cukup besar di perairan pesisir. Luas perairan payau mencapai 82.274

ha yang potensial untuk budidaya udang windu, vanameii, kakap putih, dan ikan nila.

Kegiatan pasca panen komoditi perikanan sebagian besar dijual dalam bentuk segar (26.503 Ton tahun 2012), baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor. Jenis pengolahan ikan yang banyak dilakukan penduduk adalah: terasi, kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk telur cumi (kricu), getas, empek-empek, otak-otak ikan, dan sebagainya.

Komoditi yang memiliki ekonomis yang tinggi seperti ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, sirip ikan dan lain-lain. Produksi ikan laut di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2011 (**Tabel 9**) mencapai 8.983,68 Ton dengan nilai produksi sebesar 174.201,761 juta rupiah. Produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Muntok dengan produksi sebanyak 1.881,05 Ton dengan nilai 35.818,44 juta rupiah.

Tabel 9. Jumlah produksi ikan laut dan nilainya per kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2011

Kecamatan	Produksi	Nilai
Muntok	1.881,05	35.818.440,05
Simpang Teritip	1.778,31	33.672.944,86
Jebus	741,37	14.970.358,00
Kelapa	1.413,48	28.510.745,56
Tempilang	1.792,63	35.581.320,95
Parittiga	1.376,84	25.647.951,83
Jumlah	8.983,68	174.201.761,24

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, (2011)

Sarana dan prasarana penangkap ikan di laut yang ada berupa perahu/kapal penangkap ikan laut yang berjumlah 583 unit, tersebar di 6 kecamatan yaitu Muntok 75 kapal, Simpang Teritip 136 kapal, Tempilang 243 kapal, Kelapa 9 kapal, Jebus 49 kapal, dan Parittiga 71 kapal. Rincian sarana perahu kapal penangkap ikan dan jumlah nelayan dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Jumlah sarana perahu/kapal penangkap ikan laut dan jumlah nelayan menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2011

Kecamatan	Kapal Motor				Jumlah	Perahu Tanpa Motor	Motor tempel	Jumlah Sarana	Jumlah Nelayan
	< 5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT					
Muntok	75	-	-	-	75	92	90	257	615
Simpang Teritip	136	-	-	-	136	63	125	324	360
Jebus	49	-	-	-	49	10	85	144	205
Kelapa	9	-	-	-	9	55	143	207	228
Tempilang	243	-	-	-	243	123	90	456	440

Kecamatan	Kapal Motor				Jumlah	Perahu Tanpa Motor	Motor tempel	Jumlah Sarana	Jumlah Nelayan
	< 5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT					
Parittiga	71	-	-	-	71	16	149	236	303
Jumla	583	-	-	-	583	359	682	1.624	2.151

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka (2012)

Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) di Kabupaten Bangka Barat tahun 2011 sebanyak 2.493 RTP, terdiri 2.151 RTP tangkap, 345 RTP budidaya, 253 RTP pengolah ikan dan 34 RTP ikan. Rincian penyebaran pelaku usaha perikanan disajikan pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pengumpul menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2011

Kecamatan	Tangkap	Budidaya	Pengolahan	Pengumpul	Jumlah
Muntok	385	71	100	9	565
Simpang Teritip	358	28	58	-	444
Jebus	427	37	18	5	487
Kelapa	213	130	-	7	350
Tempilang	478	83	50	5	616
Parittiga	-	-	-	-	-
Jumlah	1.861	345	253	34	2.493

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka (2012)

2) Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian masih menjadi andalan di Kabupaten Bangka Barat, terutama sub sektor perkebunan Produksi komoditas perkebunan rakyat dijalankan oleh masyarakat secara tradisional, terdiri dari lada, kelapa, cengkeh, coklat. Sedangkan untuk perkebunan besar dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit dengan pencadangan lahan seluas 45.352,23 Ha dan yang telah terealisasi seluas 34.405,56 Ha dan sebagian besar berada di Kecamatan Tempilang. Untuk luasan area serta sebaran tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada **Tabel 12**.

Tabel 12. Luas (Ha) area tanaman perkebunan rakyat per kecamatan dan jenis komoditi di Kabupaten Bangka Barat.

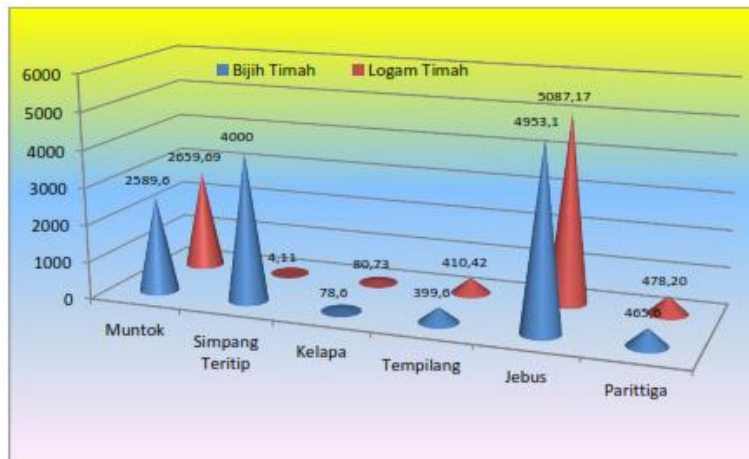
Kecamatan	Lada	Karet	Kelapa Sawit	Coklat	Kelapa	Aren
Muntok	322	1.310,30	363,53	0,45	50,08	0,03
Simpang Teritip	1.798,94	1.591,45	808,44	1,46	92,20	0,11
Jebus	666,63	3.291,45	1.281,76	2,05	83,05	0,80
Kelapa	501,55	5.695,36	4.418,86	3,54	232,72	1,74
Tempilang	510,55	2.739,26	6.177,20	4,01	745,55	1,95
Parittiga*	-	-	-	-	-	-
Kab. Bang-Barat	3.799,67	14.627,82	13.049,79	11,51	1.203,60	4,63

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka (2011)

Keterangan : Data Kecamatan Jebus masih mencakup data Kecamatan Parittiga

3) Pertambangan

Bahan galian yang paling banyak dieksplotasi di KBB dan diusahakan secara besar-besaran adalah timah yang pengelolaannya selain oleh pemerintah juga dilakukan oleh penduduk setempat dan swasta dengan jumlah terbatas. Data produksi bijih dan logam timah tahun 2011 dicantumkan dalam **Gambar 6**.



Gambar 6. Jumlah produksi bijih timah dan logam timah menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2011

4) Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Bangka Barat berupa pantai, air panas, peninggalan sejarah dan gunung/perbukitan (jenisnya di **Tabel 13**) Kabupaten Bangka Barat memiliki 10 hotel terdiri dari 1 hotel berbintang dan 9 hotel/penginapan melati. Jumlah tenaga kerja pada hotel/penginapan sebanyak 55 orang yang umumnya berpendidikan SMA.

Tabel 13. Lokasi dan Destinasi wisata di Kabupaten Bangka Selatan

Kecamatan	Alam, Pantai dan Sungai	Alam/ Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Muntok	Pantai Baturakit	Batu Balai	Hutan Konservasi Menumbing Kapal Ashjinagara Kapal SS Vyner Brooke Perkebunan Durian dan Cimpedak Karang Aji Karang Berang-Berang Perkebunan Durian Jebus
	Pantai Asmara		
	Pantai Tanjung Kalian		
	Pantai Tanjung Ular		
	Pantai Tanah Merah		
	Pantai Menggaris		
Simpang	Pantai Aikemas		

Kecamatan	Alam, Pantai dan Sungai	Alam/ Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Teritip			Hutan Cimpedak Rakyat Simpangtiga
Jebus	Pantai Tungau Pantai Bembang Pantai Mentiba	Sumur Dewa Danau Sekar Biru Pulau Nenas	Perkebunan Durian Jebus
Kelapa		Air Panas Dendang	Perkebunan Kelapa Sawit Dendang
Tempilang	Pantai Pasir Kuning		Perkebunan Kelapa Sawit Tempilang
Parittiga	Pantai Kedacak Pantai Siangau Pantai Jebu Barat Pantai Jebu Laut Pantai Tanjung Ru Pantai Cupat Pantai Pala Pantai Bakit		

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, 2011

3.7 Potensi Pasar Komoditas Ekonomi Pesisir

Komoditas ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi pasar yang besar baik di pasar lokal maupun pasar regional dan pasar nasional. Bahkan beberapa komoditas memiliki potensi pasar ekspor.

3.7.1 Potensi Pasar Lokal

Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi permintaan suatu produk atau komoditas. Keempat faktor tersebut yaitu: 1) jumlah penduduk dan distribusinya; 2) pendapatan masyarakat; 3) harga produk dan ketersediaan barang pengganti; dan 4) selera dan preferensi konsumen.

Selama periode 2003-2011 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat tumbuh rata-rata 4,77% per tahun. Pada periode tersebut pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 15,71%, sedang yang terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu 0,31%. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tentunya harus diimbangi dengan tingkat penyediaan pangan, termasuk pangan dari jenis ikan, yang semakin meningkat juga. Pada sisi lain tingkat produksi perikanan Kabupaten Bangka Barat pada periode tahun 2009 – 2011 berdasar data yang terdapat dalam Bangka Barat Dalam Angka 2012 mengalami pertumbuhan rata-rata -3,68% per tahun atau mengalami penurunan produksi yaitu dari 9.958,77 ton tahun 2009 menjadi 9.088,87 ton tahun 2011. Data ini menunjukkan bahwa produksi perikanan daerah ini masih harus ditingkatkan jika ingin mencapai swasembada ikan.

Jika membandingkan antara data produksi perikanan dengan data jumlah penduduk maka akan didapat data ketersediaan pasokan ikan per kapita (**Tabel 14**). Ketersediaan pasokan ikan per kapita Kabupaten Bangka Barat pada periode 2009 – 2011 mengalami penurunan, penurunan ini diduga menjadi penyebab masuknya ikan-ikan dari luar wilayah Bangka Barat bahkan ikan impor dari luar negeri ke daerah ini khususnya pada musim-musim ketika hasil tangkapan ikan laut sedang rendah atau sedikit.

Tabel 14. Ketersediaan pasokan ikan per kapita Kabupaten Bangka Barat tahun 2009-2011

Tahun	Produksi perikanan (ton)	Jumlah penduduk (jiwa)	Ketersediaan pasokan (kg/orang)
2009	9.958,77	154.530	64,44
2010	8.370,00	178.801	46,81
2011	9.088,87	189,529	47,95

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2012 (diolah)

Selain jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk juga merupakan salah satu faktor yang mendorong permintaan produk/komoditi perikanan. Pada periode tahun 2006-2011 pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun daerah ini meningkat rata-rata sebesar 1,48% atas dasar harga konstan, sedang jika menggunakan harga berlaku maka peningkatannya lebih tinggi lagi yaitu 10,04% per tahun.. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat daerah ini termasuk terhadap produk/komoditas perikanan semakin meningkat.

Harga produk dan ketersediaan barang pengganti merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi besarnya permintaan terhadap suatu produk/komoditas, termasuk harga komoditas perikanan. Harga ikan yang digunakan sebagai acuan dalam tulisan ini yaitu harga teri medan no 1 karena tersedia data *time series*-nya. Berdasar data *time series* harga teri medan no 1 periode 2006 – 2011 terlihat bahwa pada periode tersebut harga ikan teri medan mengalami kenaikan dari Rp 31.383 per kg pada tahun 2006 menjadi Rp 35.000 per kg tahun 2011 atau rata-rata kenaikannya sebesar 7,33% per tahun. Rincian datanya dicantumkan dalam **Tabel 15**.

Tabel 15. Perkembangan harga rata-rata 9 bahan pokok di Kabupaten Bangka Barat periode 2006-2011

Jenis Sembako	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beras	5.010	5.500	6.250	6.500	6.838	8.179
Teri Medan No 1	31.383	32.500	29.000	50.000	52.167	35.000
Minyak goreng	7.083	8.750	11.500	9.625	9.917	11.667

Gula pasir	6.481	6.500	6.750	9.083	10.458	10.667
Garam halus	258	500	500	500	500	500
Minyak tanah	4.542	4.375	4.958	4.750	4.333	6.667
Sabun cuci	2.000	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
Bahan katun	17.500	50.000	55.000	50.000	50.000	25.000
Batik halus	35.000	-	-	40.000	40.000	40.000

Sumber : *Bangka Barat Dalam Angka 2012 dan Bangka Barat Dalam Angka 2010*

3.7.2 Potensi Pasar Regional dan Nasional

Beberapa jenis komoditas perikanan dari Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi untuk dipasarkan ke pasar regional seperti ke Pangkal Pinang atau ke pasar nasional dan pasar ekspor. Jenis-jenis ikan yang memiliki potensi pemasaran keluar daerah diantaranya ikan kakap merah, teri, tenggiri, kerapu, udang putih, kepiting, rajungan dan cumi-cumi. Namun karena produksi jenis-jenis ikan tersebut relatif tidak terlalu besar maka sebagian besar hanya dipasarkan di pasar lokal Kabupaten Bangka Barat.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Isu Strategis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Secara umum terdapat 4 (empat) kelompok permasalahan pokok, yaitu: (1) isu sumberdaya alam; (2) isu sosial dan kelembagaan; (3) isu strategis ekonomi; dan (4) isu strategis pasar. Ada keterkaitan erat antara karakteristik sumberdaya alamnya/kondisi wilayah, karakteristik sosial budaya, dan sumberdaya manusianya dengan peluang pengembangan ekonominya. Selain itu karakteristik masyarakat dan stratifikasi sosial yang terbentuk juga mempengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh wilayah setempat. Isu akses terhadap sumberdaya baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung pada pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan perumahan maupun bentuk-bentuk aktualisasi diri individu menjadi perhatian masyarakat. Namun demikian, secara umum terdapat tipikal yang menjadi ciri khas, sehingga secara garis besar isu dan permasalahan di bawah ini dapat dikelompokkan menjadi wilayah pesisir daratan besar, wilayah kepulauan yang belum berkembang, maupun wilayah kepulauan yang sedang berkembang.

4.1.1 Isu Strategis Sumberdaya Alam

Beberapa isu strategis yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Bangka Barat antara lain:

- 1) Eksplorasi tambang timah di perairan pantai telah menjadi kegiatan yang sangat dominan, hal ini karena kawasan kuasa tambang timah yang menjadi areal pertambangan mencakup area yang sangat luas termasuk wilayah laut,

sehingga akan potensial berbenturan (konflik) pemanfaatan ruang dengan kepentingan ekonomi pesisir lainnya termasuk aktivitas masyarakat seperti perikanan tangkap, budidaya ikan, dan wisata bahari;

- 2) Kegiatan eksplorasi timah di laut dan di darat juga telah meningkatkan kekeruhan air laut di sekitarnya. Hal ini kemungkinan menjadi salah satu penyebab semakin berkurangnya ikan di perairan;
- 3) Berkurangnya sumberdaya ikan semakin dirasakan oleh nelayan dengan semakin sedikitnya hasil tangkapan ikan;
- 4) Tingginya harga ikan segar menyebabkan kurang ekonomisnya upaya pengolahan, kecuali pada saat musim dan hasil tangkapan ikan melimpah sehingga ada sebagian ikan yang tidak terjual dan menjadi bahan baku pengolahan produk;
- 5) Pemanfaatan sumberdaya batu granit belum optimal karena hanya digunakan sebagai bahan baku batu split, bukan sebagai bahan baku lantai granit;
- 6) Kerusakan sumberdaya seperti kerusakan lahan pasca penambangan timah dan abrasi, seperti di Benteng Kota Kec. Tempilang.
- 7) Produksi pengolahan hasil perikanan sudah jenuh, karena kapasitas pasar yang terbatas sehingga cukup sulit mengembangkan skala usaha, tanpa adanya peningkatan kualitas produk dan inovasi produk. Dari penelusuran menunjukkan bahwa sebagian produk pengolahan, dibuat tanpa mempertimbangkan higienisitas produk dan lingkungan.

4.1.2 Isu Strategis Sosial dan kelembagaan

Pada aspek sosial kelembagaan, beberapa isu strategis yang menonjol berkisar pada 3 hal: (a) sikap mental dan kualitas masyarakat yang masih rendah; (b) manajemen pemberdayaan ekonomi pemerintah yang belum fokus dan terpadu; serta (c) lemahnya lembaga ekonomi dan pasar untuk mendukung perekonomian masyarakat. Rincian isu-isu strategis dan permasalahan sosial dan kelembagaan adalah :

- 1) Sikap kewirausaha masyarakat masih rendah
- 2) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir
- 3) Program pemberdayaan masyarakat belum berkelanjutan
- 4) Pola pembinaan kepada masyarakat pemerintah daerah yang kurang terpadu dan masih sektoral
- 5) Perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang belum terpadu
- 6) Data dan informasi potensi daerah yang minim
- 7) Sikap mental masyarakat yang semakin pragmatis
- 8) Sikap apatis terhadap pemerintahan karena program yang tidak berkelanjutan dan tidak terpadu
- 9) Tenaga pendamping masyarakat/penyuluh masyarakat yang kurang optimal

membina masyarakat

- 10) Masyarakat pelaku ekonomi belum terbiasa berkelompok, modal sosial masih belum cukup berkembang
- 11) Kelembagaan ekonomi masyarakat belum berkembang
- 12) Lembaga keuangan/perbankan untuk perekonomian pesisir dikalahkan penjamin individu (*toke'/tengkulak*)
- 13) *Miss management* sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi

4.1.3 Isu Strategis Ekonomi

Pada aspek perekonomian beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis adalah:

- a) Akses modal terbatas
- b) Aktivitas ekonomi yang bersifat musiman
- c) Ketersediaan bahan bakar minyak untuk nelayan terbatas
- d) Sarana prasarana perikanan yang minim dan tidak optimal

4.1.4 Isu Strategis Pasar

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pemasaran komoditas/produk dari daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat diuraikan dibawah ini.

- 1) Ketersediaan atau pasokan ikan dipengaruhi musim penangkapan
- 2) Masuknya ikan-ikan dari luar Bangka Barat termasuk ikan impor
- 3) Sebagian nelayan terikat dengan tengkulak/bakul
- 4) Pengembangan nilai tambah produk masih kurang.

4.2 Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Berdasar pada analisis terhadap isu dan permasalahan strategis, secara umum dapat diidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat. Pemangku kepentingan yang terkait tersebut, baik sebagai pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*) maupun pemangku kepentingan kedua (*secondary stakeholders*). Pola keterkaitan juga bersifat langsung maupun tidak langsung. Hubungan permasalahan dan pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan penanganan masalah tersebut untuk Kabupaten Bangka Barat disajikan pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Pemangku kepentingan penanganan isu dan permasalahan di Kabupaten Bangka Barat

Permasalahan	Pemangku Kepentingan																			
	Bappeda	BLH	Distamben	Dinkes	Dishub	Disperta	DKP	Disdik	Disdagkop UKM	PLN	Disparta	Dishut	Unit Penyuluh	Bank-LK	Asosiasi Usaha	TNI/Polri	PDAM	LSM	Swasta	Perg Tinggi
A. Ekonomi																				
Akses modal terbatas						✓	✓		✓				✓	✓						✓
Kegiatan tergantung alam (musiman)					✓	✓	✓		✓				✓					✓		
Konflik nelayan dengan penambang <i>illegal</i>		✓	✓				✓						✓			✓		✓		
BBM nelayan terbatas-minim SPDN			✓				✓								✓	✓				
Masuknya ikan dari luar Bangka (termasuk luar negeri)							✓		✓				✓							
Pengembangan produk yang memiliki nilai tambah masih kurang							✓		✓				✓							
Sebagian nelayan terikat dengan tengkulak							✓		✓				✓	✓						
Sarana prasarana pendukung produksi yang minim dan belum optimal					✓		✓		✓	✓			✓				✓			
B. Pasar																				
Ketersediaan atau pasokan ikan dipengaruhi musim penangkapan							✓	✓	✓				✓							✓
Masuknya ikan-ikan dari luar Bangka Barat termasuk ikan impor							✓	✓	✓											✓
Nelayan terikat dengan tengkulak / bakul							✓	✓	✓				✓							✓
Pengembangan produk yang memiliki nilai tambah masih kurang					✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
C. SDA& Lingkungan																				
Konflik pemanfaatan ruang laut (tata ruang)	✓	✓	✓													✓			✓	
Kerusakan ekosistem pesisir karena aktivitas penambangan timah di laut		✓	✓				✓						✓			✓		✓		

Permasalahan	Pemangku Kepentingan																			
	Bappeda	BLH	Distamben	Dinkes	Dishub	Disperta	DKP	Disdik	Disdagkop UKM	PLN	Disparta	Dishut	Unit Penyuluh	Bank-LK	Asosiasi Usaha	TNI/Polri	PDAM	LSM	Swasta	Perg Tinggi
Pencemaran lingkungan perairan laut		✓					✓									✓				
Berkurangnya sumberdaya ikan		✓					✓													
Pengolahan ikan belum ekonomis							✓		✓											
Kerusakan lahan akibat tambang liar di daratan dan pesisir		✓	✓			✓						✓				✓		✓		
Produksi pengolahan sudah jenuh karena kapasitas pasar yg terbatas							✓		✓	✓										
D. Kelembagaan																				
Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah belum terpadu, dan Sektoral	✓				✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓			✓		✓
Sikap mental wirausaha masih rendah								✓					✓					✓		✓
Kualitas SDM masih rendah								✓					✓					✓		✓
Program pemberdayaan ekonomi belum berkelanjutan	✓					✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		
Data dan informasi potensi daerah yang minim	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓								✓
Pembinaan masyarakat/ penyuluhan dan pendampingan kurang optimal						✓	✓		✓		✓	✓	✓					✓		
Pola hidup masyarakat yang makin pragmatis								✓					✓					✓		
Sikap apatis terhadap pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
Modal sosial berkelompok belum berkembang								✓					✓					✓		✓
Kelembagaan ekonomi belum berkembang	✓						✓		✓					✓						✓
Perbankan/ Lembaga keuangan belum menarik masyarakat							✓							✓						
Miss management Pengelolaan srapras ekonomi	✓	✓			✓		✓						✓							

Sumber: Hasil Analisis, 2013

4.3 Kebijakan, Strategi Dan Arah Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

4.3.1 Komoditas Unggulan Prioritas Pilihan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bangka Barat dibangun dengan dasar pemilihan komoditas unggulan di tiap kecamatan pesisir, dimana komoditas unggulan ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Berdasar Analisis dengan menggunakan pendekatan *Priority Plus Index* (PPI) atau Indeks Unggulan Prioritas (IUP), kemudian dipilih tiga komoditas prioritas dengan nilai PPI tertinggi untuk menjadi komoditas prioritas utama dan tambahan pada masing-masing kecamatan seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 17**.

Tabel 17. Komoditas Prioritas Utama dan Tambahan

No	Jenis Komoditas	Priority Plus Index (PPI)	Prioritas Komoditas Pilihan	Kelas Komoditas
I Kecamatan Tempilang				
1	Penangkapan kepiting hitam (mangrove)	44,56	Utama	Silver
2	Penangkapan udang	31,05	Tambahan 1	Silver
3	Pengolahan terasi	30,95	Tambahan 2	Silver
II Kecamatan Simpang Teritip				
1	Pengolahan ikan teri	73,66	Utama	Silver
2	Penangkapan kepiting (rajungan)	58,15	Tambahan 1	Silver
3	Penangkapan kepiting hitam (mangrove)	41,37	Tambahan 2	Silver
III Kecamatan Kelapa				
1	Penangkapan kepiting (rajungan)	58,15	Utama	Silver
2	Penangkapan udang lipan	54,55	Tambahan 1	Silver
3	Penangkapan kepiting hitam (mangrove)	52,83	Tambahan 2	Silver
IV Kecamatan Parit Tiga				
1	Penangkapan udang lipan	49,57	Utama	Silver
2	Penangkapan kepiting hitam (mangrove)	49,04	Tambahan 1	Silver
3	Penangkapan udang	31,05	Tambahan 2	Silver
V Kecamatan Jebus				
1	Penangkapan kepiting (rajungan)	49,04	Utama	Silver
2	Penangkapan kepiting hitam (mangrove)	44,56	Tambahan 1	Silver
3	Penangkapan udang	28,21	Tambahan 2	Silver
VI Kecamatan Muntok				
1	Pengolahan ikan teri	60,80	Utama	Silver
2	Wisata pantai	55,25	Tambahan 1	Silver
3	Penangkapan udang	35,55	Tambahan 2	Silver

Sumber: Hasil analisis, Oktober 2013.

4.4 Kebijakan PEMP Kabupaten Bangka Barat

4.4.1 Arah, Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir diharapkan dapat didorong menjadi program yang bertujuan untuk mencapai proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir melalui pendekatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta industri pengolahan, untuk menghasilkan produk atau jasa berbasis ekosistem pesisir melalui peningkatan kualitas input, proses, dan output.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir didukung dengan arah kebijakan terintegrasi, kebijakan ekonomi makro, pengembangan infrastruktur, sistem usaha dan investasi, IPTEK dan SDM, serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Tujuan program PEMP ini adalah :

- a) Meningkatkan daya saing komoditas perikanan dan kelautan.
- b) Meningkatkan nilai tambah dan kualitas komoditas perikanan dan kelautan yang mencakup input (ekosistem pesisir), proses (sistem produksi) dan output (nilai tambah komoditas).
- c) Meningkatkan kualitas pengelolaan produksi dan industri pengolahan komoditas perikanan dan kelautan.
- d) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan.
- e) Ruang lingkup program PEMP ini adalah sebagai berikut :
- f) Rehabilitasi dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir sebagai media stabilisasi upaya pemanfaatan komoditas perikanan dan kelautan.
- g) Peningkatan kualitas sistem produksi komoditas perikanan dan kelautan.
- h) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan komoditas perikanan dan kelautan.
- i) Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan bisnis komoditas perikanan dan kelautan berbasis masyarakat.

Program PEMP berbasis komoditas perikanan dan kelautan ini diarahkan agar dapat sejalan dengan program-program pembangunan daerah dan pengembangan komoditas lainnya, terutama dalam hal *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-growth*.

Arahan kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

- a) Menciptakan “model klaster bisnis komoditas” yang dinilai akan dapat banyak membantu kelangsungan aktivitas pelaku usaha berbasis komoditas perikanan

dan kelautan. Melalui model ini, diharapkan kemitraan dapat dibangun melalui komunikasi dan implementasi nyata diantara pemangku kepentingan secara sinergis dan saling menguntungkan. Dengan demikian pengembangan ekonomi lokal melalui sistem agribisnis komoditas perikanan dan kelautan dapat menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing kolektif, dan meningkatkan perdagangan komoditas perikanan dan kelautan daerah.

- b) Peningkatkan kualitas komoditas perikanan dan kelautan untuk meningkatkan nilai tambah sehingga berdampak terhadap meningkatnya penyerapan pasar komoditas perikanan dan kelautan. Melalui upaya ini diharapkan komoditas perikanan dan kelautan akan lebih diminati konsumen luar, sehingga dapat meningkatkan permintaan dan pada gilirannya berdampak terhadap pendapatan dan perekonomian pelaku usaha khususnya dan Kabupaten Bangka Barat pada umumnya.

4.4.2 Strategi dan Arahan Program PEMP Kabupaten Bangka Barat

Strategi Program PEMP Kabupaten Bangka Barat diarahkan pada aspek-aspek manajemen potensi, masyarakat dan usaha sebagai berikut:

- 1) Perlu dibuat standar prosedur baku (SOP) yang terkait dengan teknik produksi, teknik penanganan pascapanen, teknik penyimpanan (penggudangan) dan transportasi, sehingga perlu dibuat *pilot project* yang bisa menjadi contoh sukses.
- 2) Adanya *buffer stock* bahan baku komoditas perikanan dan kelautan dengan menerapkan sistem resi gudang. Oleh karena itu, diperlukan *pilot project* di beberapa wilayah sebagai kawasan-kawasan yang tepat dalam mengembangkan sistem resi gudang dikaitkan dengan sentra produksi komoditas perikanan dan kelautan dan sebaran usaha pengolahannya.
- 3) Standar mutu komoditas perikanan dan kelautan perlu dibuat untuk menghasilkan komoditas perikanan dan kelautan berkualitas dan terjaga mutunya. Parameter yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan mutu ini, diantaranya yaitu mutu sensorik, fisik, dan kimia. Standar mutu ini perlu dirumuskan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terutama kalangan pelaku usaha dan *buyers*.
- 4) Mendorong adanya kebijakan makro daerah yang efektif dan efisien terutama untuk menempatkan pengembangan bisnis komoditas perikanan dan kelautan ini sebagai salah satu *prime mover* pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat.
- 5) Membangun dan mengembangkan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung program PEMP.

- 6) Menggalang dan mendorong dukungan penelitian dan pengembangan teknologi pemanfaatan dan pengolahan komoditas perikanan dan kelautan.
- 7) Menciptakan mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasikan kepentingan dunia industri berbasis komoditas perikanan dan kelautan, masyarakat dan pemerintah, baik yang bersifat aturan main (*role of the game*) maupun organisasi, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan partisipasi dan inisiatif dari seluruh komponen masyarakat.
- 8) Mengembangkan usaha berbasis komoditas perikanan dan kelautan yang berorientasi pada kluster usaha dan bertumpu pada kekuatan wilayah dan sumberdaya lokal yakni posisi strategis, ketersediaan input produksi, termasuk sumberdaya alam, SDM, dan sistem sosial budaya lokal;
- 9) Mengembangkan usaha berbasis komoditas perikanan dan kelautan yang berorientasi pada pasar serta didukung oleh teknologi maju dan berbasiskan partisipasi dunia bisnis yang profesional dan dukungan ekonomi rakyat.
- 10) Mengembangkan usaha berbasis komoditas perikanan dan kelautan yang berorientasi pada optimalisasi nilai tambah yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah.
- 11) Mengembangkan usaha berbasis komoditas perikanan dan kelautan dengan pendekatan kewilayahan yang dirancang secara terpadu dalam kerangka konsep agribisnis. Pengembangan model seperti ini diharapkan akan dapat meningkatkan skala ekonomi yang bermuara pada efisiensi dan peningkatan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.
- 12) Mendorong penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha berbasis komoditas perikanan dan kelautan terutama dalam konteks manajemen risiko.
- 13) Mendorong perbaikan kebijakan dukungan permodalan yang selama ini masih bersifat parsial dan sporadis harus diubah menjadi dukungan permodalan yang terencana.
- 14) Pembukaan pasar produk hasil perikanan melalui pasar ekspor dan kegiatan pariwisata.
- 15) Implementasi standarisasi sanitasi dan higiene unit pengolahan untuk meningkatkan mutu produk.
- 16) Peningkatan kualitas dan penyajian produk melalui kemasan yang baik.
- 17) Pemerintah daerah menyediakan *outlet* pemasaran produk olahan ikan.
- 18) Melakukan identifikasi kelompok ibu-ibu nelayan dkk yang telah mendapatkan pelatihan pengolahan ikan.
- 19) Ekstensifikasi kegiatan budidaya ikan dan marikultur serta kemandirian dalam penyediaan pasokan pakan ikan.
- 20) Perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya yang menjadi habitat komoditas.

21) Mitigasi dan rehabilitasi degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan perairan dan ekosistem pesisir dan laut.

Prioritas strategi, arahan program, kegiatan dan tahapan yang dapat dikembangkan dalam program PEMP Kabupaten Bangka Barat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 19.

4.5 Rencana Implementasi Program PEMP Kabupaten Bangka Barat

Implementasi program PEMP Kabupaten Bangka Barat didesain atas dasar hasil penentuan komoditas unggulan prioritas (utama dan tambahan). Implementasi ini dilakukan secara bertahap berdasarkan skema keberlanjutan program. Daftar lengkap analisis ekonomis implementasi program PEMP di Kabupaten Bangka Barat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 20.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Luky. 2013. Instrumen Penelitian Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir. Working paper disampaikan sebagai bahan diskusi pengembangan metodologi penentuan indeks unggulan prioritas pada kegiatan Kajian Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, September 2013.
- Adrianto, Luky, Y. Wahyudin, S.B. Susilo, Z. Imran, dan Yonvitner. 2011. Kriteria Penentuan Pulau Kecil Bernilai Ekonomi Tinggi untuk Mendukung Investasi. Working paper disampaikan dalam rangka Penyusunan Kriteria Pulau-Pulau Kecil yang Bernilai Ekonomi Tinggi untuk Mendukung Investasi. Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Badan Pusat Staistik, 2012. Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2012. BPS Kab. Bangka Barat. Muntok
- Badan Pusat Statistik, 2012. Kecamatan Muntok Dalam Angka 2012. BPS Kab. Bangka Barat. Muntok
- Badan Pusat Statistik, 2012. Kecamatan Jebus Dalam Angka 2012. BPS Kab. Bangka Barat. Muntok
- Badan Pusat Statistik, 2012. Kecamatan Parit Tiga Dalam Angka 2012. BPS Kab. Bangka Barat. Muntok
- Badan Pusat Statistik, 2012. Kecamatan Kelapa Dalam Angka 2012. BPS Kab. Bangka Barat. Muntok
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Barat. 2012. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Muntok
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Barat. 2012. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Muntok
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Barat. 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014. Muntok
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Barat. 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat. Muntok
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat, 2013. Statistik Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat 2012. DKP Kab. Bangka Barat. Muntok
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2012. Penyusunan / Pemetaan Rencana tata Ruang Laut Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. Laporan Akhir kerjasama Bappeda Kab. Bangka Barat. Jakarta.

- Wahyudin, Yudi. 2013. Proporsi Indeks Sosial-Ekonomi Dalam Penentuan Indeks Kepekaan Lingkungan (Socio-Economics Index Proportion for Measuring Environmental Sensitivity Index) (February 7, 2013). YDW-WP.2013-02. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2213209> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2213209>.
- Wahyudin, Y., L. Adrianto, R. Suwandi, W. Oktariza, and M.A. Al Amin. 2013. Metode Penentuan Komoditas Unggulan Prioritas (Method of Determining Priority Plus of Commodities) (September 17, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=http://ssrn.com/abstract=2328606>.